

KATA PENGANTAR

Drs. Helmizar

**Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Kajian Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat bisa diterbitkan. Buku ini mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), ini dapat terselesaikan.

Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan. Dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK. Buku ini juga mengulas tentang struktur atau pola Belanja Daerah di kabupaten/kota apakah sudah mencapai ketentuan Belanja Modal minimal 30% atau belum, antara realisasi DAK dengan perkembangan Belanja Modal, serta pertanggungjawaban Belanja Modal, yang bisa dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Format kajian dalam buku ini kami tampilkan dalam bentuk infografis serta uraian yang singkat, padat dan jelas. Selain itu, kami juga mengelompokkan kabupaten/kota sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil), hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para Anggota DPR RI untuk melihat gambaran implementasi Belanja Modal pada kabupaten/kota yang mereka wakili.

Semoga buku “Kajian Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat ini bermanfaat untuk Anggota DPR RI khususnya yang mewakili Dapil Jawa Barat pada saat rapat komisi, kunjungan kerja maupun pada saat reses dan menemui konstituennya.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas terbitnya buku ini dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kritik dan perbaikan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2018

DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Kerangka Teori.....	7
Bab III Pembahasan.....	9
Gambaran Umum Opini BPK.....	10
Gambaran Umum Temuan BPK.....	11
1. Kajian Belanja Modal Kota Bandung dan Kota Cimahi..	13
1.1. Gambaran Umum Kota Bandung.....	14
1.2. Gambaran Umum Kota Cimahi.....	15
1.3. Hasil dan Pembahasan.....	16
1.3.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	16
1.3.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.....	16
1.3.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	17
2. Kajian Belanja Modal Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.....	19
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Bandung.....	20
2.2. Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat.....	21
2.3. Hasil dan Pembahasan.....	22
2.3.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	22
2.3.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal....	22
2.3.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	23
3. Kajian Belanja Modal Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.....	25
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Cianjur.....	26
3.2. Gambaran Umum Kota Bogor.....	27
3.3. Hasil dan Pembahasan.....	28
3.3.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	28
3.3.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal....	29
3.3.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	30

4. Kajian Belanja Modal Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.....	33
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Sukabumi.....	34
4.2. Gambaran Umum Kota Sukabumi.....	35
4.3. Hasil dan Pembahasan.....	36
4.3.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	36
4.3.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.....	37
4.3.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	38
5. Kajian Belanja Modal Kabupaten Bogor.....	41
5.1. Gambaran Umum Kabupaten Bogor.....	42
5.2. Hasil dan Pembahasan.....	43
5.2.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	43
5.2.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.....	44
5.2.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	44
6. Kajian Belanja Modal Kota Bekasi dan Kota Depok.....	47
6.1. Gambaran Umum Kota Bekasi.....	48
6.2. Gambaran Umum Kota Depok.....	49
6.3. Hasil dan Pembahasan.....	50
6.3.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	50
6.3.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.....	50
6.3.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	51
7. Kajian Belanja Modal Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.....	53
7.1. Gambaran Umum Kabupaten Purwakarta.....	54
7.2. Gambaran Umum Kabupaten Karawang.....	55
7.3. Gambaran Umum Kabupaten Bekasi.....	56
7.4. Hasil dan Pembahasan.....	57
7.4.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	57
7.4.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.....	58
7.4.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	59

8. Kajian Belanja Modal Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.....	61
8.1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon.....	62
8.2. Gambaran Umum Kota Cirebon.....	63
8.3. Gambaran Umum Kabupaten Indramayu.....	64
8.4. Hasil dan Pembahasan.....	65
8.4.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	65
8.4.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.....	66
8.4.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	67
9. Kajian Belanja Modal Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang.....	69
9.1. Gambaran Umum Kabupaten Subang.....	70
9.2. Gambaran Umum Kabupaten Majalengka.....	71
9.3. Gambaran Umum Kabupaten Sumedang.....	72
9.4. Hasil dan Pembahasan.....	73
9.4.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	73
9.4.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.....	75
9.4.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	75
10. Kajian Belanja Modal Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Banjar.	77
10.1. Gambaran Umum Kabupaten Ciamis.....	78
10.2. Gambaran Umum Kabupaten Kuningan.....	79
10.3. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran.....	80
10.4. Gambaran Umum Kota Banjar.....	81
10.5. Hasil dan Pembahasan.....	82
10.5.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	82
10.5.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.....	84
10.5.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	84
11. Kajian Belanja Modal Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.....	87
11.1. Gambaran Umum Kabupaten Garut.....	88
11.2. Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya.....	89
11.3. Gambaran Umum Kota Tasikmalaya.....	90
11.4. Hasil dan Pembahasan.....	91
11.4.1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah.....	91
11.4.2. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.....	93
11.4.3. Pertanggungjawaban Belanja Modal.....	93
Daftar Pustaka.....	95
Daftar Singkatan dan Akronim.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung dan Kota Cimahi	16
Tabel 2.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.....	22
Tabel 3.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.....	29
Tabel 4.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.....	37
Tabel 5.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor.....	43
Tabel 6.	Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi dan Kota Depok....	50
Tabel 7.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.....	58
Tabel 8.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.....	66
Tabel 9.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang.....	74
Tabel 10.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar.....	83
Tabel 11.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.....	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kota Cimahi dan Kota Bandung Pada Belanja Modal TA. 2014-2016...	17
Grafik 2.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Pada Belanja Modal TA. 2014-2016.....	23
Grafik 3.	Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor TA. 2014-2016.....	28
Grafik 4.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor Pada Belanja Modal TA. 2014-2016.....	31
Grafik 5.	Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi TA. 2014 2016.....	36
Grafik 6.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi Pada Belanja Modal TA. 2014-2016.....	38
Grafik 7.	Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten Bogor TA. 2014-2016.....	43
Grafik 8.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bogor Pada Belanja Modal TA. 2014-2016.....	45
Grafik 9.	Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kota Depok dan Kota Bekasi TA. 2014- 2016.....	51
Grafik 10.	Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang TA. 2014- 2016.....	57
Grafik 11.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang Pada Belanja Modal TA. 2014-2016.....	59
Grafik 12.	Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon TA. 2014- 2016.....	65
Grafik 13.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon Pada Belanja Modal TA. 2014-2016.....	68

Grafik 14.	Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang TA. 2014-2016.....	73
Grafik 15.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang Pada Belanja Modal TA. 2014-2016.....	76
Grafik 16.	Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan TA. 2014- 2016.....	82
Grafik 17.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Modal Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan Pada Belanja Modal TA. 2014-2016.....	85
Grafik 18.	Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut TA. 2014- 2016.....	91
Grafik 19.	Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Modal Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan Pada Belanja Modal TA. 2014-2016.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perspektif keuangan negara atau sektor publik, Belanja Daerah adalah suatu bentuk kompensasi finansial yang mengurangi nilai kekayaan bersih suatu daerah dan yang kedua bahwa belanja daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan pelayanan publik (DJPk Kemenkeu, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 2, jenis belanja dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Belanja Operasi yang meliputi pengeluaran pemerintah daerah pada barang/jasa yang masa pakainya kurang dari 12 bulan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Perjalanan Dinas untuk Aparatur Sipil Negara dan Belanja Pemeliharaan;
- b. Belanja Modal yang meliputi pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik seperti bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik;
- c. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa (bencana alam dan hal-hal yang bersifat *force majeure*).

Sejak disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Belanja daerah dilaksanakan dengan konsep desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam hal pelaksanaan pembangunan di daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Wewenang tersebut salah satunya adalah meliputi Belanja Daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui transfer ke daerah.

Transfer ke Daerah dalam APBD diharapkan akan menjadi stimulus perekonomian bagi Pemerintah Daerah khususnya bagi kabupaten/kota melalui belanja yang berkualitas. Belanja berkualitas menurut Kappeler *et.al* (2012) adalah belanja yang produktif dengan memperbesar alokasi Belanja Modal untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Secara kuantitas, porsi alokasi yang ideal untuk Belanja Modal adalah sebesar 30% dari total belanja daerah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 RPJMN 2015-2019. Diharapkan semua pemerintah kabupaten/kota dapat

merealisasikan Belanja Modal sebanyak 30% selambat-lambatnya pada tahun 2019.

Sumber pembiayaan Belanja Modal di daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK bersifat *specific purpose grant* yang penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan bersifat prioritas nasional. Semakin besar DAK yang digelontorkan ke daerah maka diharapkan akan semakin besar pula Belanja Modal pemerintah daerah.

Disamping itu, Belanja Modal tadi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan yang terkait Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memiliki beberapa implikasi terhadap keuangan negara/daerah dimana yang paling serius adalah yang mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaannya, menurut Kementerian Keuangan dalam pemaparannya di harian Sindonews (2017), realisasi belanja pemerintah daerah sebagian besar dihabiskan untuk Belanja Pegawai yang termasuk dalam lingkup Belanja Operasi ketimbang Belanja Modal. Sementara itu berdasarkan rilis dari Kemendagri pada Tahun 2014, cukup banyak pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan dari DAK untuk membiayai Belanja Modalnya. Tentunya realisasi DAK tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan Belanja Modal dari tahun ke tahun. Dari aspek pertanggungjawaban, BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015-2016 menilai bahwa permasalahan yang menyebabkan kerugian daerah adalah permasalahan pengelolaan Belanja Modal dan juga Barang/Jasa. Sedangkan pada IHPS I Tahun 2017, BPK menyatakan bahwa permasalahan kerugian daerah masih mendominasi dimana diantaranya terjadi pada Belanja Modal disamping juga Belanja Barang dan Jasa.

Anggota DPR RI yang mempunyai hak *budgeting* berharap agar dana transfer pusat ke daerah dapat dibelanjakan secara baik dan benar oleh pemerintah daerah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Daerah Pemilihannya (Dapil). Dalam hal ini, pengawasan terhadap Belanja Modal memegang peranan penting sebagai indikator untuk melihat proses pembangunan di daerah.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR-RI dalam melakukan fungsi pengawasan, akan mengkaji realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Modal berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2014-2016 tersebut.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dapat diuraikan pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran proporsi Belanja Modal terhadap total belanja daerah di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana gambaran tentang tren antara realisasi DAK dengan realisasi Belanja Modal masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana gambaran tentang pertanggungjawaban Belanja Modal masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat?

Objek Kajian

Dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian dikarenakan Jawa Barat adalah salah satu provinsi strategis yang wilayahnya menjadi penyangga Ibukota Jakarta. Namun berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kapasitas Fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2013-2015 tergolong rendah.

Peta Kapasitas Fiskal pada tahun tersebut menjadi acuan dalam pengalokasian transfer pusat pada Tahun 2014-2016. Daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dapat dipastikan memiliki ketergantungan pada bantuan keuangan pemerintah pusat. Tentunya realisasi transfer dalam bentuk DAK tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendorong Belanja Modal dari tahun ke tahun agar mampu mencapai setidaknya 30% dari total belanja daerahnya dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi temuan BPK terutama temuan yang menyebabkan kerugian daerah.

Secara spesifik sampel yang menjadi objek dalam kajian ini dikelompokkan menjadi 11 Dapil yang terdiri dari 27 kabupaten/kota sebagai berikut:

Daerah Pemilihan	Kabupaten/Kota
Jawa Barat I	Kota Bandung dan Kota Cimahi
Jawa Barat II	Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat
Jawa Barat III	Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor
Jawa Barat IV	Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi
Jawa Barat V	Kabupaten Bogor
Jawa Barat VI	Kota Bekasi dan Kota Depok
Jawa Barat VII	Kabupaten Purwakarta dan Karawang Bekasi
Jawa Barat VIII	Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu
Jawa Barat IX	Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang

Jawa Barat X	Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran
Jawa Barat XI	Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya

Dasar pengelompokan sampel menjadi 11 Dapil dimaksudkan untuk memudahkan Anggota DPR RI melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan Dapil masing-masing.

Metode Kajian

Metode penulisan kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pengumpulan data yang kemudian dilakukan interpretasi pada data yang tersedia. Penulisan secara deskriptif ditujukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai keadaan saat ini dan gambaran hubungan antar variabel untuk memberikan uraian yang lebih mendalam.

Metode untuk menginterpretasikan data dalam kajian ini merujuk pada Miles *et.al* (2014) yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Penyajian data
3. Kondensasi data
4. Kesimpulan

Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) yang meneliti mengenai DAK dan Belanja Modal di 326 kabupaten/kota di Indonesia, dan menemukan hubungan positif antara DAK dengan Belanja Modal. Kemudian Nuarisa (2013) dan Wandira (2013) dalam penelitiannya juga menemukan hal serupa. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan tujuan dari pengalokasian DAK yaitu untuk mendanai program-program nasional pemerintah di daerah, dimana salah satu programnya adalah terkait Belanja Modal. Sehingga semakin besar DAK yang didapat, maka alokasi Belanja Modal pun akan meningkat (Sugiyanta, 2016).

Penelitian secara spesifik dalam satu wilayah dilakukan oleh Sugiantini (2015) di Kabupaten Buleleng. Hasilnya disimpulkan bahwa peningkatan realisasi DAK akan diikuti oleh kecenderungan kenaikan Belanja Modal. Sedangkan penelitian terkait struktur atau proporsi realisasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah, telah dilakukan oleh Nurhidayati dan Yaya (2013).

Untuk penelitian terkait pertanggungjawaban Belanja Modal, telah dilakukan oleh Gaghauna *et.al* (2017) di Kabupaten Talaud, yang mengungkapkan bahwa gambaran pertanggungjawaban Belanja Modal pemerintah daerah dapat dilihat dari ada tidaknya nilai temuan kepatuhan berulang atas audit Belanja Modal yang dilakukan oleh BPK pada TA. 2013-2015.

Batasan Kajian

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, kajian ini hanya memfokuskan pada gambaran atau deskripsi proporsi Belanja Modal, realisasi DAK secara umum, dan Temuan BPK atas Belanja Modal.

Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis membatasi pada realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Modal di kabupaten/kota yang tergabung dalam satu Dapil dan tidak membandingkan secara global antar Dapil yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Jenis Data

Data yang dikaji merupakan jenis data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat TA. 2014-2016.

Tujuan Kajian

1. Memberikan gambaran proporsi Belanja Modal terhadap total belanja daerah di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat;
2. Memberikan gambaran tentang tren antara realisasi DAK dengan realisasi Belanja Modal masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat;
3. Memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban Belanja Modal masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat.

